Penyuluhan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan (Siri)

Legal Counseling About Under-Marriage (Siri)

Johan's Kadir Putra, Roziqin, Susilo Handoyo

Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan

Abstrak

Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan petugas pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang non muslim. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku sejak 32 tahun lalu, praktek perkawinan yang melanggar Undang-Undang ini masih saja terjadi dengan berbagai alasan. Karena adanya pencatatan perkawinan di bawah tangan, maka muncul beberapa problematika dan implikasi negatif akibat dari perkawinan bawah tangan tersebut. beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, diantaranya adalah: faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.

Kata Kunci : Penyuluhan hukum, Nikah Dibawah Tangan, Akibat hukum

Abstract

Underhanded marriages are marriages that are conducted outside the supervision of the marriage registrar so that the marriages are not recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) for Muslims and in the Department of Population and Civil Registration for non-Muslims. Even though the Marriage Law has been in force 32 years ago, the practice of marriages that violates this law still occurs for a variety of reasons. Due to underhand marriage, several problems and negative implications arise from the underhand marriage. Some of the factors behind Sirri's marriage, among others are: factors of official / work or school ties, factors not yet quite old, pregnancy factors outside of marriage as the effects of promiscuity, factors of lack of understanding and awareness of the community about marriage registration, factors that are difficult for polygamy rules, social factors and factors for unclear marriage registration provisions.

Keywords: *Legal education, Marriage Under the Hand, Legal consequences*

PENDAHULUAN

Secara berkesinambungan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan tinggi yang diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggungjawab, menjalani kehidupan secara bertanggungjawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

Demi cita-cita yang mulia tersebut, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan, keterampilan, kepekaan, dan kecintaan mahasiswa terhadap pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 ayat (2) dinyatakan : “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat”. Pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan : “ Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelolah sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat”.

Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Perguruan Tinggi dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Kuliah Kerja Nyata terpadu adalah suatu kegiatan ekstrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, yang dilaksanakan diluar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, KKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan anatra dunia akademik teoritik dan dunia empiris praktik. Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat serta diharapkan dapat mengembangkan kepekaan rasa dan

kognisi sosial mahasiswa terhadap lingkungan bermasyarakat yang dapat membuat suatu budaya yang kreatif, aktif, peduli, mandiri, dan berakhlakul kharimah.

Dalam kegiatan KKN yang akan dilaksanakan, kami mengambil tema mengenai akibat hukum bagi pernikahan bawah tangan yang saat ini marak terjadi di masyarakat, khususnya di kelurahan Nangka kecamatan Balikpapan selatan kota Balikpapan. Nikah dibawah tangan atau yang juga disebut dengan nikah siri adalah fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat jika diteliti secara seksama, kondisi ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat, tradisional pedesaan tetapi juga terjadi pada masyarakat perkotaan yang mungkin tingkat pola pikir mereka lebih maju disamping tercukupinya segala informasi dan pengetahuan kekinian.

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru.¹

Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan petugas pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang non muslim. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku sejak 32 tahun lalu, praktek perkawinan yang melanggar Undang-Undang ini masih saja terjadi dengan berbagai alasan. Karena adanya pencatatan perkawinan di bawah tangan, maka muncul beberapa problematika dan implikasi negatif akibat dari perkawinan bawah tangan tersebut.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah. Sehingga, bisa dianggap

¹ Sri Endang Rayung Wulan, "PERCERAIAN YANG MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP ANAK KHUSUSNYA ANAK DIBAWAH UMUR," *Journal de Facto* 6, no. 1 (30 Agustus 2019): hlm. 2, <https://pascasarjana.uniba->

tidak sah atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.²

Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. “Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”.³

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan

² Arsyad Said, “NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (31 Juli 2018): hlm. 6, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/251>.

³ Rahmi Meldayati, “Psiko-Ekologi Prespektif IBN A’rabi” (Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 126.

secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) dan akibat hukumnya.⁴

Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan.⁵

Dari sedikit paparan tentang fenomena mengenai perkawinan di bawah tangan, terlihat bahwa trend praktik kedua perkawinan tersebut di kota Balikpapan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara upaya penanggulangan belum banyak dilakukan bahkan cenderung

semakin lama semakin diabaikan. Sehingga dengan kegiatan KKN ini, diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai kepastian hukum perkawinan dibawah tangan terutama terkait dengan dampak negatif yang dapat muncul akibat perkawinan tersebut bagi kehidupan di masyarakat.

LUARAN

Pengabdian ini menghasilkan upaya untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, prestasi dan kesejahteraan masyarakat dan generasi muda di Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan.

METODE PELAKSANAAN

Sungai Nangka merupakan salah satu kelurahan yang ada dikecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kelurahan ini dibentuk pada tahun 2012 dan merupakan pemekaran dari Kelurahan Gunung Bahagia. Alasan kami memilih lokasi KKN Gelombang II tahun 2017 yang bertempat di Kelurahan Sungai Nangka karena sesuai dengan salah satu fungsi Tridharma Universitas Balikpapan yaitu mengabdikan kepada masyarakat.

⁴ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (23 November 2017): hlm. 71, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>.

⁵ Burhanuddin burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hlm. 12.

Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan merupakan kelurahan hasil pemekaran dari kelurahan Gunung Bahagia sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2012 dan berlaku aktif dalam proses pelayanan kepada masyarakat dimulai pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013. Luas wilayah kelurahan Sungai nangka adalah 3.204 km² yang terdiri dari 38 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk WNI adalah = 20.499 jiwa terdiri dari laki-laki = 10.654 jiwa dan perempuan = 9.845 jiwa, sedangkan jumlah penduduk WNA adalah = 16 jiwa terdiri dari laki-laki = 13 jiwa dan perempuan = 3 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat dikategorikan Kelurahan Sungai Nangka memiliki penduduk yang padat sementara wilayahnya tidak terlalu luas.

Dengan perkembangan jaman seiring dengan perdangan keseluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial serta modernisasi tidak dapat dielakan karena perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahap Pembangunan Nasional di segala bidang dewasa ini yang merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya. Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif dalam masyarakat khususnya di kelurahan Sungai Nangka ; seperti Kekerasan terhadap anak, KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), Eksploitasi Anak (menyuruh anak bekerja), nikah Siri, Narkoba.

Tabel 1 : Identifikasi Masalah

No.	Permasalahan	Lokasi (RT)	Sumber (P/M/D)
1.	Kekerasan dalam rumah tangga		M
2.	Eksplotasi Anak		M
3.	Perkawinan dibawah tangan (Siri)		M
4.	Penyalahgunaan Obat-obatan		M

P = Perangkat Desa/Dusun, M = Masyarakat,

D = Dinas atau Instansi Vertikal/*Stakeholders*.

Tabel 2 : Prioritas Pemilihan Masalah

No.	Permasalahan	Alasan Pemilihan *
1.	Perkawinan dibawah tangan (Siri)	Karena jumlah perkawinan di bawah tangan (Siri) di kelurahan Nangka yang terus meningkat, serta akibat hukum yang merugikan kaum wanita/istri dan anak.

*Uraikan secara rinci mengapa permasalahan diprioritaskan permasalahannya, sehingga layak diangkat sebagai program KKN-PPM (Mono).

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 : Rencana Program dan Kegiatan

No.	Bidang	Program-Program	Kegiatan-kegiatan	Sumber Dana
1.	Sosial dan Hukum	Penyuluhan hukum	Memberikan penyuluhan tentang akibat hukum perkawinan dibawah tangan (Siri) kepada warga di Posyandu RT 23 Kel. Sungai Nangka	Mandiri
2.	Hukum	Penyuluhan hukum	Memberikan penyuluhan tentang NAPZA kepada siswa/i di SMP Negeri 10 Balikpapan	Mandiri
3.	Sosial	Baksos	Santunan ke Yayasan Jundur - Rosul	Mandiri
4.	Sosial	Data ABK	Melaksanakan pendataan Anak-anak berkebutuhan khusus di Kelurahan Sungai Nangka	Mandiri

Abdi Hukum Masyarakat : Jurnal Pengabdian Pascasarjana Universitas Balikpapan

Vol.1 No.1 Juni 2019

Kuliah kerja nyata merupakan bentuk perpaduan ketiga tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian Masyarakat. Dalam melaksanakan KKN-PPM Mono Kelompok 4 Gel. II Fakultas Hukum Universitas Balikpapan di Kelurahan Sungai Nangka yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Agustus – 31 Agustus 2017, ada beberapa program kerja yang telah dilaksanakan antara lain :

- melakukan pengenalan lingkungan dan mencari data/identifikasi masalah sebagai bahan perencanaan penyusunan program kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di Kelurahan Sungai Kecamatan Balikpapan Selatan;
- penyuluhan hukum tentang larangan dan dampak penggunaan NAPZA kepada Siswa/-i yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 di SMP Negeri 10 Balikpapan;
- penyuluhan hukum tentang perkawinan dibawah tangan (Siri) kepada Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka yang telah dilaksanakan pada

hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017 di Posyandu RT 23 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan;

- kegiatan bakti sosial, silaturahmi dan berbagi kepada LKSA yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017 di Yayasan Jundur-Rosul Jln. Manunggal 53 RT 24 Kel. Sungai Nangka; dan
- pendataan anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 30 Agustus 2017 di Kelurahan Sungai Nangka.

Hasil penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:
Fenomena perkawinan sirri (dibawah tangan) saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Maraknya fenomena perkawinan sirri di Indonesia tentu akan merugikan banyak pihak terkait, baik negara maupun masyarakat (pelaku dan keluarga). Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi

terjadinya nikah sirri, diantaranya adalah: faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.

Penulis sependapat dengan Arsyad Said⁶ yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bisa jadi diakibatkan oleh faktor ekonomi, tidak terjangkaunya Kantor Urusan Agama akibat lokasi domisili yang jauh, maupun pertimbangan rumit lainnya yang memaksa pasangan merahasiakan pernikahannya. Jika alasan itu menjadi faktor seseorang menikah dibawah tangan, apakah masih bisa jadi pengecualian? Kembali saya tekankan, ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan memilih untuk menjalankan nikah dibawah tangan. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai

muncul anasir yang menyimpulkan kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatarbelakanginya. Apakah jasa-jasa nikah siri ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang punya kendala menikah di bawah undang-undang? Pernikahan yang tercatat oleh negara tetap merupakan sebuah pilihan yang wajib diprioritaskan oleh pasangan yang hendak menikah. Saya tidak setuju dengan keberadaan jasa nikah siri yang marak bermunculan di kota-kota besar. Selama masih ada KUA, sebaiknya pasangan mencatatkan pernikahannya.

KESIMPULAN

Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan merupakan kelurahan hasil pemekaran dari kelurahan Gunung Bahagia sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2012 dan berlaku aktif dalam proses pelayanan kepada masyarakat dimulai pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013. Luas wilayah kelurahan Sungainangka adalah 3.204 km² yang terdiri dari 38 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah

⁶ Said, "NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," hlm. 14.

penduduk WNI adalah = 20.499 jiwa terdiri dari laki-laki = 10.654 jiwa dan perempuan = 9.845 jiwa, sedangkan jumlah penduduk WNA adalah = 16 jiwa terdiri dari laki-laki = 13 jiwa dan perempuan = 3 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat dikategorikan Kelurahan Sungai Nangka memiliki penduduk yang padat sementara wilayahnya tidak terlalu luas.

Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif dalam masyarakat khususnya di kelurahan Sungai Nangka ; seperti Kekerasan terhadap anak, KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), Eksploitasi Anak (menyuruh anak bekerja), nikah Siri, Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (23 November 2017): 69–90. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>.
- Meldayati, Rahmi. “Psiko-Ekologi Prespektif IBN A’rabi.” Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Said, Arsyad. “NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (31 Juli 2018): 1–16. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/251>.
- Wulan, Sri Endang Rayung. “PERCERAIAN YANG MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP ANAK KHUSUSNYA ANAK DIBAWAH UMUR.” *Journal de Facto* 6, no. 1 (30 Agustus 2019). <https://pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/jurnal/index.php/jurnaldefacto/article/view/13>.